

Pengaruh Pengendalian Intern, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi terhadap Budgetary Slack dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan)

Nining Aprilia¹ ✉

¹ Universitas Sapta Mandiri, Balangan, Kalimantan Selatan, Indonesia

✉ liaapril037@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to partially determine how much influence Internal Control, Clarity of Budget Targets and Transparency have on Budgetary Slack and Financial Performance Accountability Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan). The method used in this research is a quantitative method and with a population of 101 (One Hundred and One) people, samples were taken using the sampling method used in this research is the census method with a total of 101 (One Hundred and One) employees, Pemerintahan Desa, validity test research instruments and reliability test, the data was tested using partial regression analysis (Partial Least Square/ PLS) to test the seven hypotheses proposed in this research. Each hypothesis will be analyzed using SmartPLS 3.0 software to test the relationship between variables. The results of this research show that partially the influence of internal control, clarity of budget targets and transparency on budgetary slack, the influence of internal control, clarity of budget targets and transparency on budgetary slack and financial performance accountability through budgetary slack on Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan)

Keywords: Internal Control, Clarity of Budget Targets, Transparency of Budgetary Slack and Financial Performance Accountability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial seberapa besar Pengaruh Pengendalian Intern, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Transparansi Terhadap Budgetary Slack Dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan dengan populasi berjumlah 101 (Seratus Satu) orang, diambil sampel dengan Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus sebanyak yang berjumlah 101 (Seratus Satu) orang pegawai Pemerintahan Desa, instrument penelitian uji validitas dan uji reliabilitas, data – data diuji dengan menggunakan analisis regresi partial (*Partial Least Square/ PLS*) untuk menguji ketujuh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan software SmartPLS 3.0 untuk menguji hubungan antar variable. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pengaruh

Dipublikasikan Oleh:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Sapta Mandiri**

Pengendalian Intern, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi Terhadap Budgetary Slack, Pengaruh Pengendalian Intern, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Transparansi Terhadap Budgetary Slack Dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan melalui Budgetary Slack pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan)

Kata Kunci: Pengendalian Intern, Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi Terhadap Budgetary Slack Dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Desa menghadapi tantangan yang memerlukan upaya terpadu di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi, memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendukung RPJMN 2020-2024, pembangunan desa perlu ditangani secara terintegrasi dengan alokasi program sektoral tahun 2023 sebesar 11,4 triliun rupiah. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan desa dan potensi pendanaan sektor.

Dana Desa difokuskan pada pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan melalui swakelola, penggunaan bahan lokal, dan penyerapan tenaga kerja desa. Penggunaan Dana Desa di luar prioritas harus mendapat persetujuan bupati/walikota.

Anggaran adalah rencana keuangan yang membantu pengendalian, perencanaan, dan evaluasi kinerja organisasi. Budget slack, yaitu bias informasi dalam penyusunan anggaran, sering terjadi akibat partisipasi penganggaran yang tidak tepat, memungkinkan penyalahgunaan kewenangan dan pembengkakan biaya. Fenomena ini berkontribusi pada pembengkakan APBD di Indonesia, seringkali diperparah oleh korupsi, sehingga anggaran menjadi tidak tepat sasaran.

UU No. 6 Tahun 2014 memberikan desa kewenangan untuk mengelola dana secara mandiri, namun pelaksanaannya menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan pengelolaan dana yang besar. Tabel 1 menggambarkan perkembangan dana desa dalam APBN.

Tabel 1. Besaran Dana Desa (dalam ribuan Rupiah)

Tahun	Jumlah Dana Desa	Pertumbuhan
2019	117.443.279.104	0,0%
2020	121.826.348.214	3,6%
2021	121.315.375.340	-0,4%

Sumber : APBN Indonesia

Tabel 1.1 Menunjukkan dana APBN untuk alokasi Dana Desa tahun 2019 sangat besar yaitu Rp.117.443.279.104.000, dana ini sangat besar mengingat pada masa itu masa covid 19, maka pemerintah menganggap perlu desa menjaga kestabilan pangan, dan jaminan kesehatan di desa maka anggarannya besar, kemudian naik lagi tahun 2020 sebesar 3,6% karena pada

masa itu masa memuncaknya covid 19 untuk menjaga penyebaran covid 19 maka dana desa terus ditambah lagi, hingga tahun 2021 sebesar Rp.121.315.375.340.000 besarnya angka ini menunjukkan banyak dana desa di pergunakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Selain itu, ketepatan sasaran anggaran sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan. Perencanaan anggaran perlu disesuaikan dengan rencana kerja lima tahunan yang mendukung visi dan misi kepala daerah. Sayangnya, fenomena pola perencanaan anggaran yang monoton masih sering terjadi akibat kurangnya inovasi. Sistem pengendalian intern yang baik harus dilaksanakan oleh Inspektorat serta pimpinan SKPD sebagai pengguna anggaran. Sebelum pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa wajib mematuhi aturan yang berlaku dan berkonsultasi dengan Inspektorat jika ada keraguan, untuk memastikan kegiatan sesuai aturan dan tujuan. Transparansi anggaran juga perlu ditingkatkan, baik untuk internal organisasi maupun masyarakat umum, sesuai Pasal 9 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah desa wajib mempublikasikan laporan keuangan secara akurat, komprehensif, dan tepat waktu agar masyarakat dapat memantau pengelolaan anggaran.

Ketepatan sasaran anggaran di Kabupaten Balangan harus sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020, yang mengatur bahwa belanja daerah tidak hanya terfokus pada operasional pegawai, tetapi juga harus mendukung pembangunan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Transparansi dalam pengelolaan anggaran diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan penggunaan anggaran lebih efektif, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima penerimaan yaitu penerimaan dari sektor pajak dan retribusi sebagai berikut :

Tabel 2

Tabel 1.2

Penerimaan Pada Pemerintahan Desa Murung Ilung Kecamatan
Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan

1. Pendapatan Desa			
	Rencana / Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
PENDAPATAN ASLI DESA			
Hasil Usaha	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 0
Hasil Aset	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong	Rp. 35.000.000	Rp. 0	Rp. 35.000.000
PENDAPATAN TRANSFER			
Dana Desa	Rp. 792.566.000	Rp. 0	Rp. 792.566.000
Bagi Hasil Pajak & Retribusi	Rp. 63.427.000	Rp. 0	Rp. 63.427.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 466.502.000	Rp. 0	Rp. 466.502.000
Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 115.000.000	Rp. 0	Rp. 115.000.000
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
Hibah	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Sumbangan Pihak ketiga	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Pendapatan Lain-lain	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
2. Belanja Desa			
	Rencana / Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 569.713.522	Rp. 400.000.000	Rp. 169.713.522
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp. 701.039.000	Rp. 0	Rp. 701.039.000
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Rp. 84.323.375	Rp. 0	Rp. 84.323.375
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp. 190.180.684	Rp. 0	Rp. 190.180.684
BELANJA TAK TERDUGA	Rp. 15.810.000	Rp. 0	Rp. 15.810.000
3. Pembiayaan Desa			
	Rencana / Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
SILPA	Rp. 122.928.294	Rp. 0	Rp. 122.928.294
Pencairan Dana Cadangan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 32.742.000	Rp. 0	Rp. 32.742.000
Penyertaan Modal Desa	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0

Sumber : Pemerintahan Desa Murung Ilung Kecamatan Paringin, Kabupaten
Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Dipublikasikan Oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Sapta Mandiri

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa rencana anggaran untuk Pendapatan Asli Desa yang tentang Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong masih belum terealisasi, dan saat ini Pendapatan asli daerah masih mengandalkan Pendapatan Transfer, sementara anggaran untuk Belanja Desa dan Pembiayaan Desa masih belum 100% terealisasi, hal ini menandakan masih kurangnya kualitas SDM desa dalam memanfaatkan dana desa tersebut.

Akuntabilitas pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sangat penting karena mencerminkan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas. LAKIP menjadi dasar evaluasi akuntabilitas kinerja, mempertahankan kepercayaan, dan meningkatkan efektivitas instansi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dirancang untuk menetapkan, mengukur, dan melaporkan kinerja sesuai Perpres No. 29 Tahun 2014, dengan indikator kinerja yang menunjukkan keberhasilan instansi.

Kinerja keuangan desa mencerminkan kemampuan mengelola sumber daya dan menentukan pencapaian tujuan dana desa. Pengelolaan keuangan yang buruk, seperti pencatatan dan pelaporan tidak konsisten, menghambat evaluasi dan optimalisasi penggunaan dana. Dana desa digunakan untuk membiayai berbagai belanja desa, dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas kinerja keuangan Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai, dan Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, belum maksimal. Analisis SWOT dalam Renstra 2019-2021 menunjukkan masih adanya masalah yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan akuntabilitas. Walaupun capaian kinerja sudah baik, perbaikan akuntabilitas harus berkelanjutan seiring pertumbuhan Kabupaten Balangan dan perkembangan aturan, sehingga kinerja keuangan desa dapat berjalan lebih baik tanpa menimbulkan masalah baru.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pengendalian Intern, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Transparansi Terhadap Budgetary Slack Dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan).**

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan dengan populasi berjumlah 101 (Seratus Satu) orang, diambil sampel dengan Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus sebanyak yang berjumlah 101 (Seratus Satu) orang pegawai Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan), instrument penelitian uji validitas dan uji reliabilitas, data – data diuji dengan menggunakan analisis regresi partial (*Partial Least Square/ PLS*) untuk menguji ketujuh

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan software SmartPLS 3.0 untuk menguji hubungan antar variable.

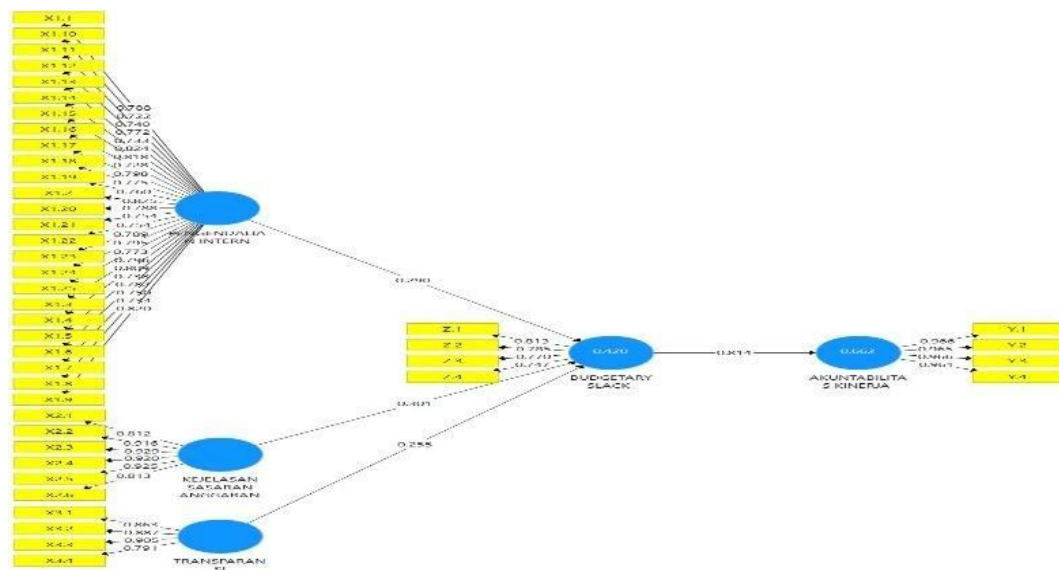
HASIL DAN PEMBAHASAN

Menilai *Outer Model* atau *Measurement Model*

Uji Validitas

1. Uji Convergent Validity

Gambar 1. Model PLS 1



Sumber Lampiran 6

a. Variabel X1 (Pengendalian Intern)

Dari hasil pengolahan data dengan PLS diketahui bahwa seluruh indikator pada variabel Pengendalian Intern dalam penelitian ini memiliki nilai loading yang lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel yang memiliki nilai loading lebih besar dari 0,70 memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga memenuhi *convergent validity*.

b. Variabel X2 (Kejelasan Sasaran Anggaran)

Dari hasil pengolahan data dengan PLS diketahui bahwa seluruh indikator pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dalam penelitian ini memiliki nilai loading yang lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel yang memiliki nilai loading lebih besar dari 0,70 memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga memenuhi *convergent validity*.

c. Variabel X3 (Transparansi)

Dari hasil pengolahan data dengan PLS diketahui bahwa seluruh indikator pada variabel Transparansi dalam penelitian ini memiliki nilai loading yang lebih besar dari 0,70.

Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel yang memiliki nilai loading lebih besar dari 0,70 memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga memenuhi *convergent validity*.

d. Variabel Z (Budgetary Slack)

Dari hasil pengolahan data dengan PLS diketahui bahwa seluruh indikator pada variabel Budgetary Slack dalam penelitian ini memiliki nilai loading yang lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel yang memiliki nilai loading lebih besar dari 0,70 memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga memenuhi *convergent validity*

e. Variabel Y (Akuntabilitas Kinerja Keuangan)

Dari hasil pengolahan data dengan PLS diketahui bahwa seluruh indikator pada variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan dalam penelitian ini memiliki nilai loading yang lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel yang memiliki nilai loading lebih besar dari 0,70 memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga memenuhi *convergent validity*.

2. Validitas Diskriminan

Semua konstruk dinyatakan reliabel dengan nilai composite reliability pada variabel Pengendalian Intern (0,957), Kejelasan Sasaran Anggaran (0,974), Transparansi (0,921), Budgetary Slack (0,860), dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan (0,982), yang semuanya $> 0,70$. Selain itu, nilai AVE masing-masing variabel juga valid (Pengendalian Intern: 0,787; Kejelasan Sasaran Anggaran: 0,601; Transparansi: 0,744; Budgetary Slack: 0,607; Akuntabilitas Kinerja Keuangan: 0,930), melebihi kriteria $> 0,50$. Discriminant validity juga terpenuhi berdasarkan nilai cross loading $\geq 0,70$ (Novrian Dandi Pratama, Ahim Abdurahim, & Hafiez Sofyani, 2018).

Uji Reliabilitas

Menurut Dionysia Kowanda (2016) syarat reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi dari hasil (data) dalam waktu yang berbeda. Untuk menguji reliabilitas konstruk dalam penelitian digunakan nilai composite reliability. Suatu variabel dikatakan memenuhi reliabilitas konstruk jika memiliki nilai composite reliability $> 0,7$ (Billy J. Maspaitella et al, 2018) dan nilai cronbach alpha yang bernilai $> 0,7$ memiliki tingkat reliabilitas yang baik bagi sebuah variabel (Assegaff, 2015). Nilai composite reliability masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3

Table 5.22

Reliability			
Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
PENGENDALIAN INTERN	0,972	0,974	Reliabel
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN	0,945	0,957	Reliabel
TRANSPARANSI	0,888	0,921	Reliabel
BUDGETARY SLACK	0,785	0,860	Reliabel
AKUNTABILITAS KINERJA	0,975	0,982	Reliabel

Sumber Lampiran 3

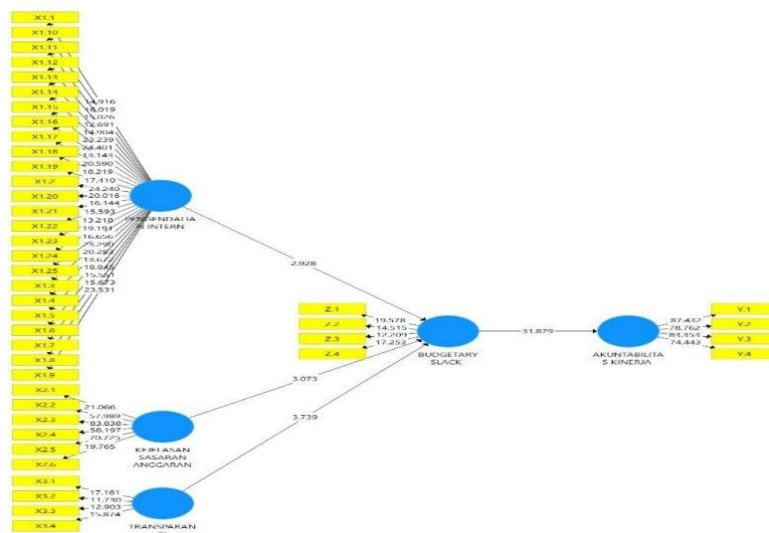
Pada tabel 3 reliability dapat dijelaskan yaitu variabel Pengendalian Intern dengan Cronbanch's Alpha 0,972 sedangkan composit reliability 0,974 maka dinyatakan reliable, variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Cronbanch's Alpha 0,945 sedangkan composit reliability 0,957 maka dinyatakan reliable, variabel Transparansi dengan Cronbanch's Alpha 0,888 sedangkan composit reliability 0,921 maka dinyatakan reliable, variabel Budgetary Slack dengan Cronbanch's Alpha 0,785 sedangkan composit reliability 0,860 maka dinyatakan reliable, variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan dengan Cronbanch's Alpha 0,975 sedangkan composit reliability 0,982 maka dinyatakan reliable.

Jika model pengukuran valid dan reliabel maka dapat dilakukan tahap selanjutnya yaitu evaluasi model structural dan jika tidak, maka harus kembali mengkonstruksi diagram jalur.

Pengujian Model Struktur (*Inner Model*)

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Gambar 2. Model Struktural



Sumber Lampiran 6

a. Uji Kebaikan Model (*Goodness of Fit*)

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Koefisien kolerasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan secara linear antara dua variabel. Jika R semakin mendekati angka 1 maka tingkat hubungan antara dua variabel semakin kuat. Tabel 4 merupakan hasil estimasi R-square dengan menggunakan SmartPLS.

Tabel 4

Tabel 5.23

Hasil Uji R-Square

	R Square	R Square Adjusted	Keterangan
BUDGETARY SLACK	0,420	0,402	Kuat
AKUNTABILITAS KINERJA	0,662	0,659	Kuat

Sumber: Lampiran 3 Uji Smart PLS

Berdasarkan data pada tabel 4, nilai R-Square untuk variabel *Budgetary Slack* adalah 0,420, yang berarti 42,0% variabilitas *Budgetary Slack* dapat dijelaskan oleh Pengendalian Intern, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Transparansi, sementara 58,0% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Persentase 42,0% menunjukkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tergolong kuat. Sedangkan nilai R-Square untuk variabel *Akuntabilitas Kinerja Keuangan* sebesar 0,695, yang berarti 69,5% variabilitas *Akuntabilitas Kinerja Keuangan* dapat dijelaskan oleh Pengendalian Intern, Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi, dan *Budgetary Slack*, sementara 31,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Persentase 31,8% menunjukkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tergolong lemah.

Penilaian *goodness of fit* diketahui dari nilai Q-Square. Nilai Q-Square memiliki arti yang sama dengan *coefficient determination* (R-Square) pada analisis regresi, dimana semakin tinggi *Q-Square*, maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan data.

Penilaian *goodness of fit* diketahui dari nilai Q-Square. Nilai Q-Square memiliki arti yang sama dengan *coefficient determination* (R-Square) pada analisis regresi, dimana semakin tinggi Q-Square, maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan data. Adapun hasil perhitungan nilai Q-Square adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Q-Square} &= 1 - [(1 - R^2_1) \times (1 - R^2_2)] \\
 &= 1 - [(1 - 0,227) \times (1 - 0,611)] \\
 &= 1 - (0,773 \times 0,398) \\
 &= 1 - 0,301 \\
 &= 0,699
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai Q-Square sebesar 0,699 dimana nilai tersebut menurut Tenenhaus, Amato, & Vinzi (2004) termasuk *Nilai Goodness of Fit* (GoF) yang besar lebih dari 0.25. Oleh karena semua indeks yang diperlukan dalam uji inner model telah memenuhi persyaratan, maka struktur model yang diajukan layak untuk memprediksi semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan

besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model penelitian adalah sebesar 69,9%. Sedangkan sisanya sebesar 30,1% dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian ini. Dengan demikian, model penelitian ini dinyatakan memenuhi syarat kebaikan (*model fit*). Hal ini menunjukkan besarnya keragaman data memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap model penelitian ini, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki *goodness of fit* yang baik

Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Dasar pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah nilai yang terdapat pada *output result for inner weight*. Hasil output estimasi untuk pengujian model struktural dapat dilihat pada table 5 berikut:

Tabel 5

Tabel 5.25

Memberikan Output Estimasi Untuk Pengujian Model Struktural

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
PENGENDALIAN INTERN → BUDGETARY SLACK	0,290	0,295	0,099	2,928	0,004
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN → BUDGETARY SLACK	0,301	0,295	0,098	3,073	0,002
TRANSPARANSI → BUDGETARY SLACK	0,255	0,267	0,068	3,739	0,000
PENGENDALIAN INTERN → AKUNTABILITAS KINERJA	0,236	0,241	0,084	2,819	0,005
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN → AKUNTABILITAS KINERJA	0,245	0,241	0,080	3,062	0,002
TRANSPARANSI → AKUNTABILITAS KINERJA	0,208	0,217	0,054	3,864	0,000
BUDGETARY SLACK → AKUNTABILITAS KINERJA	0,814	0,816	0,026	31,879	0,000

Sumber: Lampiran 4 Uji Smart PLS

Hasil pengujian dengan bootstrapping dari analisis PLS adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Budgetary Slack

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel menunjukkan bahwa untuk variabel Pengendalian Intern diperoleh nilai koefisien sebesar 0,290 artinya bahwa arah dari pengujian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, Kemudian nilai t-statistics adalah sebesar T-statistik $2,928 > T\text{-hitung } 1,661$, nilai p-value sebesar 0,004 nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha (5%). Artinya bahwa variabel Pengendalian Intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Budgetary Slack, maka hipotesis 1 diterima.

b. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Budgetary Slack

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel menunjukkan bahwa untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran diperoleh nilai koefisien sebesar 0,301 artinya bahwa arah dari pengujian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, Kemudian nilai t-statistics adalah sebesar T-statistik $3,073 > T\text{-hitung } 1,661$, nilai p-value sebesar 0,002. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha (5%). Artinya bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Budgetary Slack, maka hipotesis 2 diterima.

c. Pengaruh Transparansi Terhadap Budgetary Slack

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel menunjukkan bahwa untuk variabel Transparansi diperoleh nilai koefisien sebesar 0,255 artinya bahwa arah dari pengujian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, Kemudian nilai t-Statistik adalah sebesar T-statistik $3,739 > T\text{-hitung } 1,661$, nilai p-value 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha (5%). Artinya bahwa variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Budgetary Slack, maka hipotesis 3 diterima.

d. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel menunjukkan bahwa untuk variabel Pengendalian Intern diperoleh nilai koefisien sebesar 0,236 artinya bahwa arah dari pengujian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, Kemudian nilai t-statistics adalah sebesar $2,819 > 1,661$, nilai p-value sebesar 0,005, nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha (5%). Artinya bahwa variabel Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan, maka hipotesis 4 diterima.

e. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel menunjukkan bahwa untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran diperoleh nilai koefisien sebesar 0,245 artinya arah dari pengujian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, Kemudian nilai t-statistics adalah sebesar $3,062 > 1,661$, nilai p-value sebesar 0,002, nilai tersebut lebih besar dari nilai alpha (5%). Artinya bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan, maka hipotesis 5 diterima.

f. Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel menunjukkan bahwa untuk variabel Transparansi diperoleh nilai koefisien sebesar 0,208 artinya bahwa arah dari pengujian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, Kemudian nilai t-statistics adalah sebesar $3,864 > 1,661$, nilai p-value sebesar 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha (5%). Artinya bahwa variabel Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Budgetary Slack, maka hipotesis 6 diterima.

g. Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel menunjukkan bahwa untuk variabel Budgetary Slack diperoleh nilai koefisien sebesar 0,814 artinya bahwa arah dari pengujian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, Kemudian nilai t-statistics adalah sebesar $31,879 > 1,661$, nilai p-value 0,000, nilai tersebut lebih besar dari nilai alpha (5%). Artinya bahwa variabel Budgetary Slack berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan, maka hipotesis 7 diterima.

2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

Hasil pengujian hiotesis pengaruh tidak langsung melalui Budgetary Slack sebagai variabel intervening dengan menggunakan program bantu *Sobel test Calculator* dapat disajikan pada tabel 6 berikut:

Tabel 6

Tabel 5.22

Total Indirect Effects					
Variabel	Original Sample Estimate (O)	Mean of Subsamples (M)	Standard Deviation (STEDEV)	T-Statistics	P-Value
Pengendalian Intern → Budgetary Slack → Akuntabilitas Kinerja	0,236	0,241	0,084	2,819	0,005
Kejelasan Sasaran Anggaran → Budgetary Slack → Akuntabilitas Kinerja	0,245	0,241	0,080	3,062	0,002
Transparansi → Budgetary Slack → Akuntabilitas Kinerja	0,208	0,217	0,054	3,864	0,000

Sumber: Lampiran 4 Uji Smart PLS

- a. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Melalui Budgetary Slack

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada melalui Budgetary Slack sebagai variabel intervening dengan ditunjukkan nilai tstatistic sebesar 2,819 di atas dari t tabel (1,661). Hal ini berarti Hipotesis 8 diterima. Berarti Pengendalian Intern secara tidak langsung melalui Budgetary Slack sebagai variabel intervening berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan yang berarti Pengendalian Intern mampu meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan melalui Budgetary Slack sebagai variabel intervening.

- b. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Melalui Budgetary Slack

Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan melalui Budgetary Slack sebagai variabel intervening dengan ditunjukkan nilai tstatistic sebesar 3,062 yang lebih besar dari t tabel (1,661). Hal ini berarti Hipotesis 9 diterima. Berarti Kejelasan Sasaran Anggaran secara tidak langsung melalui Budgetary Slack sebagai variabel intervening berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan, yang berarti Kejelasan Sasaran Anggaran belum kuat dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan melalui Budgetary Slack sebagai variabel intervening.

- c. Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Melalui Budgetary Slack

Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan melalui Budgetary Slack sebagai variabel intervening dengan ditunjukkan nilai tstatistic sebesar 3,864 yang lebih besar dari t tabel (1,661). Hal ini berarti Hipotesis 10 diterima. Berarti Transparansi secara tidak langsung melalui Budgetary Slack sebagai variabel intervening berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan, yang berarti Transparansi belum kuat dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan melalui Budgetary Slack sebagai variabel intervening.

Pembahasan

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Budgetary Slack pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil uji hipotesis 1, Pengendalian Intern memiliki pengaruh signifikan terhadap Budgetary Slack pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai, dan Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan. Hal ini mendukung PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menekankan pentingnya pengendalian sebagai proses berfokus pada manusia sebagai faktor kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan pendekatan COSO yang dimodifikasi, sistem pengendalian intern dirancang untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan dengan mengurangi risiko penyimpangan dalam penyusunan anggaran. Semakin tinggi tingkat pengendalian intern, semakin rendah risiko budgetary slack, seperti ditunjukkan dalam penelitian Ritonga dan Delarosa (2023), yang menemukan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan budgetary slack dana desa. Sistem pengendalian yang efektif memungkinkan pemerintah desa memenuhi sasaran dengan lebih baik, menurunkan penyimpangan anggaran, dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Budgetary Slack pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil uji hipotesis 2, Kejelasan Sasaran Anggaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Budgetary Slack pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai, dan Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan. Hal ini sesuai dengan teori Kenis (1979), yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, bila dinyatakan secara jelas dan spesifik, dapat meningkatkan pemahaman pelaksana terhadap anggaran sehingga memicu reaksi positif seperti peningkatan kepuasan kerja, efisiensi biaya, dan kinerja anggaran. Namun, ketidakefektifan dalam menyatakan sasaran anggaran secara jelas dapat meningkatkan risiko budgetary slack, terutama ketika penyusun anggaran yang memiliki informasi lebih dibandingkan atasan mereka memanfaatkan celah untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kejelasan sasaran anggaran harus dinyatakan dengan tegas, spesifik, dan mudah dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran untuk mengurangi potensi penyimpangan.

Pengaruh Transparansi terhadap Budgetary Slack pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil uji hipotesis 2, transparansi berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang menekankan pentingnya transparansi dalam

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. Transparansi yang baik dapat mengurangi kesenjangan budgetary slack dengan meminimalkan peluang penyimpangan dalam penyusunan anggaran. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Diantari dan Ni Luh Eka Januri (2022), yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan budgetary slack di pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan transparansi yang lebih baik, Pemerintahan Desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, mengurangi penyimpangan anggaran, dan lebih mudah mencapai target yang ditetapkan, serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini sejalan dengan konsep sistem pengendalian intern (COSO) yang tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan pengendalian, tetapi juga pada lingkungan pengendalian yang dibangun, termasuk faktor manusia yang berperan penting, seperti integritas, etika, dan komitmen pemimpin terhadap kompetensi. Sistem pengendalian intern yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi akuntabilitas kinerja keuangan yang lebih baik, sehingga pegawai di Pemerintahan Desa dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Sistem pengendalian intern juga bertujuan untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengendalian intern yang baik, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan Pemerintahan Desa dapat meningkat, mendukung efisiensi dan efektivitas operasional, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pegawai pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun kejelasan sasaran anggaran penting sebagai alat perencanaan dan pengendalian, pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja tidak signifikan tanpa dukungan partisipasi aktif, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian yang baik. Hal ini konsisten dengan teori Goal Setting yang menyatakan bahwa sasaran yang jelas dapat memengaruhi kinerja jika pegawai berkomitmen mencapainya, serta penelitian lain yang menekankan pentingnya moderasi oleh komitmen organisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dengan melibatkan seluruh elemen organisasi

dalam pengelolaan anggaran dan memperkuat sistem pengendalian untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan secara berkelanjutan

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pegawai pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi mengacu pada pemberian informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Hasil ini selaras dengan penelitian oleh Ulfi Nella Audia dan Erly Mulyani (2023), yang menunjukkan transparansi dan kepatuhan hukum berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, meskipun kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki dampak signifikan. Transparansi dalam tata kelola pemerintahan mencerminkan upaya pertanggungjawaban publik dan peningkatan manajemen untuk mengurangi peluang praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dengan keterbukaan informasi, diharapkan terwujud persaingan politik yang sehat serta kebijakan yang berbasis pada preferensi publik. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi untuk mendukung akuntabilitas, meskipun diperlukan faktor pendukung lain agar dampaknya signifikan.

Pengaruh Budgetary Slack terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa Budgetary Slack berpengaruh negatif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan teori Candra Sari (2018:238), senjangan anggaran diciptakan untuk membuat target kinerja lebih mudah dicapai, mengatasi ketidakpastian masa depan, dan memberikan fleksibilitas anggaran, namun hal ini seringkali merusak kinerja organisasi karena dianggap sebagai pemborosan. Penelitian Diantari dan Januri (2022) mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas dapat mengurangi budgetary slack di pemerintahan daerah. Dalam konteks pemerintahan desa, budgetary slack dapat mengindikasikan ketidakmampuan pemimpin dalam menyelesaikan konflik tujuan organisasi, sehingga berdampak negatif pada kinerja keuangan. Komitmen organisasi yang tinggi menjadi kunci untuk meminimalkan budgetary slack, karena individu dengan komitmen tinggi akan memprioritaskan pencapaian tujuan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran yang didukung oleh komitmen yang kuat mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan secara signifikan.

Pengaruh tidak langsung Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan melalui Budgetary Slack sebagai variabel intervening

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Budgetary Slack pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, dengan Akuntabilitas Kinerja Keuangan sebagai variabel intervening, menunjukkan hubungan yang signifikan. Peningkatan pengendalian intern yang dirancang dan dilaksanakan oleh Those Charged With Governance, kepala desa, serta pegawai mampu meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap regulasi, yang pada akhirnya memengaruhi pengelolaan Budgetary Slack secara lebih optimal. Proses ini mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja keuangan yang lebih baik, sebab pengendalian intern yang kuat mendorong penggunaan anggaran secara lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pengendalian intern dalam memperkuat hubungan antara pengelolaan Budgetary Slack dan akuntabilitas keuangan pemerintahan desa.

Pengaruh tidak langsung Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan melalui Budgetary Slack sebagai variabel intervening

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Budgetary Slack pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, dengan Akuntabilitas Kinerja Keuangan sebagai variabel intervening, menunjukkan hubungan yang signifikan. Kejelasan sasaran anggaran, yaitu sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik, jelas, dan mudah dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab, memainkan peran penting dalam mengelola Budgetary Slack. Apabila kejelasan sasaran anggaran terus ditingkatkan, pengelolaan Budgetary Slack yang lebih baik dapat dicapai, yang pada gilirannya akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan desa. Tingkat Budgetary Slack yang dikelola dengan baik tidak hanya mendukung efektivitas penggunaan anggaran tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Pengaruh tidak langsung Transparansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan melalui Budgetary Slack sebagai variabel intervening

Pengaruh kepemimpinan terhadap Budgetary Slack pada Pemerintahan Desa Murung Ilung, Babayau, Balang, Balida, Dahai Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, dengan Akuntabilitas Kinerja Keuangan sebagai variabel intervening, menunjukkan hubungan yang signifikan. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, melalui pengelolaan Budgetary Slack yang lebih baik, akan berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja keuangan desa. Transparansi mencerminkan perilaku kepemimpinan yang terbuka

terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pihak lainnya, dengan tujuan menciptakan kepercayaan publik. Pelaksanaan transparansi yang efektif membutuhkan komitmen organisasi yang kuat, di mana seluruh anggota berkolaborasi dalam operasional pemerintahan untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Kepemimpinan yang transparan dan berkomitmen dapat mendorong pengurangan Budgetary Slack yang tidak sehat, sehingga meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan

PENUTUP

1. Kompetensi pedagogik berpengaruh terhadap efektifitas Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Budgetary Slack dengan dinyatakan signifikan. Semakin tinggi Pengendalian Intern maka akan semakin tinggi juga Budgetary Slack Budgetary Slack.
2. Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Budgetary Slack dengan dinyatakan tidak signifikan. Semakin tinggi Sasaran Anggaran maka akan semakin tinggi juga Budgetary Slack Budgetary Slack.
3. Transparansi berpengaruh terhadap Budgetary Slack dengan dinyatakan signifikan. Semakin tinggi Transparansi maka akan semakin tinggi juga Budgetary Slack Budgetary Slack.
4. Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan dengan dinyatakan signifikan. Semakin tinggi Pengendalian Intern maka akan semakin tinggi juga Akuntabilitas Kinerja Keuangan.
5. Kejelasan Sasaran Anggaran tidak pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan dengan dinyatakan signifikan. Semakin tinggi Kejelasan Sasaran Anggaran maka akan semakin tinggi juga Akuntabilitas Kinerja Keuangan.
6. Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan dengan dinyatakan signifikan. Semakin tinggi Transparansi maka akan semakin tinggi juga Akuntabilitas Kinerja Keuangan
7. Budgetary Slack memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan dengan dinyatakan signifikan. Semakin tinggi Budgetary Slack maka akan semakin tinggi juga Akuntabilitas Kinerja Keuangan

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi. Revisi VI, PT Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dendawijaya, Lukman .2012. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Hamalik, Oemar .2012. Kurikulum dan Pembelajaran. Sinar Grafika. Jakarta.
- Imawan .2012. Pelayanan Publik di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kurniawan, 2012. Transformasi Pelayanan Publik. Pembaharuan. Yogyakarta.
- Lopiyadi, Rambat .2013. Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi. (Edisi 3). Salemba Empat . Jakarta:
- Lucas JR Henry. C, 2000. Analisis, Desain, Dan Implementasi Sistem. Informasi, Penerbit Erlangga, Edisi Tiga, Jakarta.
- Santoso, Singgih .2005. Statistik Parametrik. PT Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Siagian. P. Sondang .2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi. Aksara. Jakarta.
- Singarimbun, Masri .2010. Metode Penelitian Survei. Pustaka Belajar. Jakarta.
- Sritua, Arief .2012. Metodologi Penelitian Ekonomi, Universitas. Indonesia. Jakarta.
- Sugiono. Dr. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- _____.2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sularso, Sri .2011. Metode Penelitian Akuntansi Sebuah Pendekatan.Gramedia Jakarta.
- Umar, Husein, 2012. Metode Penelitian. Salemba Empat .Jakarta.
- Warella, 2011. Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik, Badan Penerbit. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wignjosoebroto, Sritomo .2012. Pengantar Teknik dan Manajemen Industri. Guna Widya. Surabaya